

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja, yang merupakan selisih antara realisasi hasil program utama dengan targetnya indikator yang diwakili masing-masing sasaran di dalamnya. Celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk dicari penyebab ketidakberhasilan yang dijadikan dasar penetapan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

Laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah capaian kinerja tujuan, sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) BKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021. Indikator kinerja tujuan mencerminkan benefit/impact sedangkan sasaran mencerminkan manfaat/hasil dari output yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output, indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH) dan indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2017 merupakan pengukuran kinerja akhir dari masa Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021. Oleh karena itu, untuk memudahkan mendapatkan gambaran umum capaian kinerja tujuan dan sasaran secara keseluruhan dilakukan kategori capaian kinerja berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Capaian 100%	Memuaskan
2	85% capaian < 100%	Sangat Baik
3	70% capaian < 85%	Baik
4	55% capaian < 70%	Cukup
5	Capaian 55%	Kurang

Untuk menyimpulkan keberhasilan kinerja Tujuan dan Sasaran dilakukan dengan merata-ratakan setiap capaian indikator kinerja masing-masing.

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

Dalam tahun 2017, BKD Provinsi Kalimantan Tengah Melaksanakan 5 sasaran dengan 13 indikator kinerja. Capaian kinerja rata-rata yang dilaksanakan BKD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 adalah sebesar 106,59% dengan kategori memuaskan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian	98,97
2	Meningkatkan sistem informasi kepegawaian berbasis IT	115,35
3	Meningkatkan SDM	70
4	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur	84,82
5	Meningkatkan sarana dan prasarana	180
Rata-rata capaian Sasaran Strategis		106,59

Adapun uraian capaian kinerja masing-masing sasaran beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1
“Meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian”

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk memenuhi misi “Meningkatkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian”. Capaian kinerja sasaran strategis ini didukung dengan 5 (lima) IKU.

Capaian keberhasilan masing-masing IKU disajikan pada tabel dibawah ini :

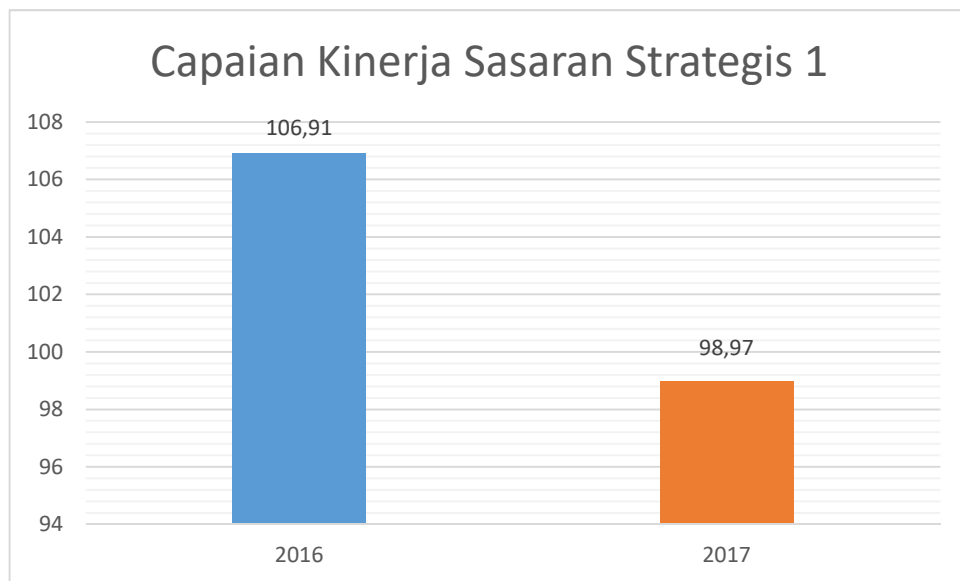
Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian Kinerja 2016 (%)
1	Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja PNS	2100	2432	115,80	65,05
2	Jumlah PNS Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan monitoring tugas belajar dan izin belajar serta revisi perda tentang tugas belajar dan izin belajar	100	82	82	18
3	Jumlah PNS yang mengambil cuti, yang membuat KARIS/KARSU, yang mendaftar sebagai peserta ASKES dan TASPEN dan	250	630	252	113,47

	menerima SKS dari total jumlah pegawai				
4	Jumlah PNS yang selesai proses penyelesaian SK mutasi	1000	186	18,60	552,2
5	Jumlah penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas dapat diterima tepat waktu	145	228	157,24	148,27
Rata-rata				98,97	106,91

Untuk tahun 2017, rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian” adalah sebesar 98,97% dengan kategori **sangat baik**. Namun, apabila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 capaiannya sebesar 106,91%, kinerja sasaran strategis 1 tahun 2017 mengalami penurunan. Adapun faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan penurunan tersebut akan dijelaskan secara terperinci pada kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam sasaran strategis 1. Rata-rata capaian kinerja sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 disajikan dalam bentuk grafik berikut ini :

Gambar 3
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2016-2017



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2016 telah tercapai sedangkan pada tahun 2017 mampu melampaui target yang dicapai pada tahun sebelumnya yang juga termasuk dalam kategori memuaskan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut diantaranya :

- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS;
- Seleksi Penetapan dan Monitoring Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
- Penyusunan Pemberian Kesejahteraan Aparatur
- Mutasi PNS;
- Peningkatan pelayanan pension; dan

- Pelepasan Pensiun/Purna Tugas PNS BUP.

Realisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran tersebut di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 887.789.855,00 atau 97,96% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 906.199.100,00.

a. Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja PNS

Indikator kinerja utama (IKU) pertama ini merupakan IKU yang dominan dalam pencapaian sasaran strategis pertama “Meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian”. Pencapaian keberhasilan IKU ini juga berkorelasi secara langsung terhadap tercapainya IKU kedua BKD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu “Meningkatkan Sistem Informasi Berbasis IT”.

Capaian kinerja indikator tersebut dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan 50,75%. Peningkatan tersebut ini didukung karena adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu kualitas SDM Aparatur BKD Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin meningkat, kemudian didukung juga oleh kesadaran PNS seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk lebih memperhatikan hak dan kewajiban PNS tersebut salah satunya yaitu masa kenaikan pangkat dan golongan PNS.

b. Jumlah PNS Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan monitoring tugas belajar dan izin belajar serta revisi perda tentang tugas belajar dan izin belajar

Indikator kinerja utama (IKU) kedua ini merupakan IKU yang dominan dalam pencapaian sasaran strategis pertama, pencapaian keberhasilan IKU ini juga berkorelasi secara langsung terhadap tercapainya IKU ketiga BKD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu “Meningkatkan SDM”. Kegiatan ini dilakukan untuk menyeleksi PNS yang berhak untuk melakukan tugas belajar dan melihat kelengkapan administrasi untuk tugas belajar dari masing-masing penerima tugas belajar. Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai perkembangan kualitas sumber daya manusia yang ada pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

Realisasi IKU untuk tahun 2017 ini adalah 100 orang. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2016 adalah 50 orang. IKU “Jumlah PNS Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan monitoring tugas belajar dan izin belajar serta revisi perda tentang tugas belajar dan izin belajar” tercapai sebesar 82% atau dengan predikat “sangat baik”.

Capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 64%. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan penyusunan Indikator Kinerja Utama yang disusun di tahun 2017 khususnya terkait dengan kegiatan Seleksi, Penetapan, dan Monitoring Tugas Belajar dan Izin Belajar yang lebih disesuaikan dengan kondisi terkini kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun dalam hal ini, terkait dengan revisi Perda tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar masih belum dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan masih belum ditetapkan Pedoman Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dari Kementerian

PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara RI yang merupakan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

c. Jumlah PNS yang mengambil cuti, yang membuat KARIS/KARSU, yang mendaftar sebagai peserta ASKES dan TASPEN dan menerima SKS dari total jumlah pegawai

Untuk tahun 2017, target IKU ditetapkan sebesar 250 orang. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2016 adalah 475 orang dengan prosentase capaian sebesar 252%. Berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja, IKU ketiga ini mendapatkan predikat “memuaskan”.

Capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan 138,53%. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut disebabkan karena terjadi penurunan target IKU 475 orang pada tahun 2016 menjadi 250 orang pada tahun 2017. Namun jika dibandingkan realisasi target yang dicapai pada tahun 2017 nilainya lebih besar dibandingkan tahun 2016 yaitu 630 orang dan 539 orang.

d. Jumlah PNS yang selesai proses penyelesaian SK mutasi

Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat pelayanan kepindahan/mutasi PNS dari kabupaten/kota. Banyaknya usulan mutasi tersebut tidak semua dapat diakomodir. Indikator ini dihitung dengan membandingkan antara realisasi laporan hasil penyelesaian SK mutasi dengan target SK mutasi yang ditentukan.

Realisasi IKU ini untuk tahun 2017 adalah sebesar 18,6% yang diperoleh dengan membandingkan penyelesaian SK dengan target yang ditentukan, yaitu sebanyak 186 SK dengan target sebanyak 1000 SK. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, terjadi penurunan drastis sebesar 533,6%. Adapun berkas yang masih dalam proses penyelesaian SK Mutasi berupa Surat Persetujuan Pindah sebanyak 182 surat, kemudian berkas usulan Mutasi sebanyak 715 berkas. Keterlambatan penyelesaian SK Mutasi pada Tahun 2017 disebabkan oleh beberapa faktor, terutama setelah ditelaah sebagian besar pegawai dari Kabupaten/Kota mengusulkan untuk pindah ke Instansi Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut menyebabkan beban kerja pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin bertambah. Sehingga perlu pengkajian ulang analisis beban kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sesuai dengan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Jumlah penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas dapat diterima tepat waktu

Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas yang dilakukan oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi penyelesaian SK PNS dengan target jumlah penyelesaian SK PNS.

Target penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas untuk tahun 2016 adalah sebanyak 145 SK dengan realisasi sebanyak 215 SK atau 148,27% dengan kategori memuaskan. Capaian kinerja indikator tersebut dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan yaitu 1,73%. Tidak sampainya target tersebut dikarenakan meningkatnya target pada tahun 2016 yang cukup signifikan yaitu yang

pada tahun 2015 memiliki target 50 SK menjadi 145 SK pada tahun 2016. Namun jika dibandingkan realisasi target yang dicapai pada tahun 2016 nilainya lebih besar dibandingkan tahun 2015 yaitu 215 SK dan 75 orang.

Sasaran Strategis 2

“Meningkatkan sistem informasi kepegawaian berbasis IT”

Dalam rangka berperan melakukan peningkatan sistem informasi kepegawaian berbasis IT, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang paling dominan dalam mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu “Jumlah PNS yang terdata secara elektronik”.

PNS yang terdata secara elektronik bertujuan memudahkan pencarian informasi data terkait pegawai di Kalimantan Tengah, informasi manajemen kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah, maupun berita kepegawaian lainnya.

Keberhasilan pencapaian dari IKU pada sasaran strategis kedua ini, disajikan pada tabel dibawah ini :

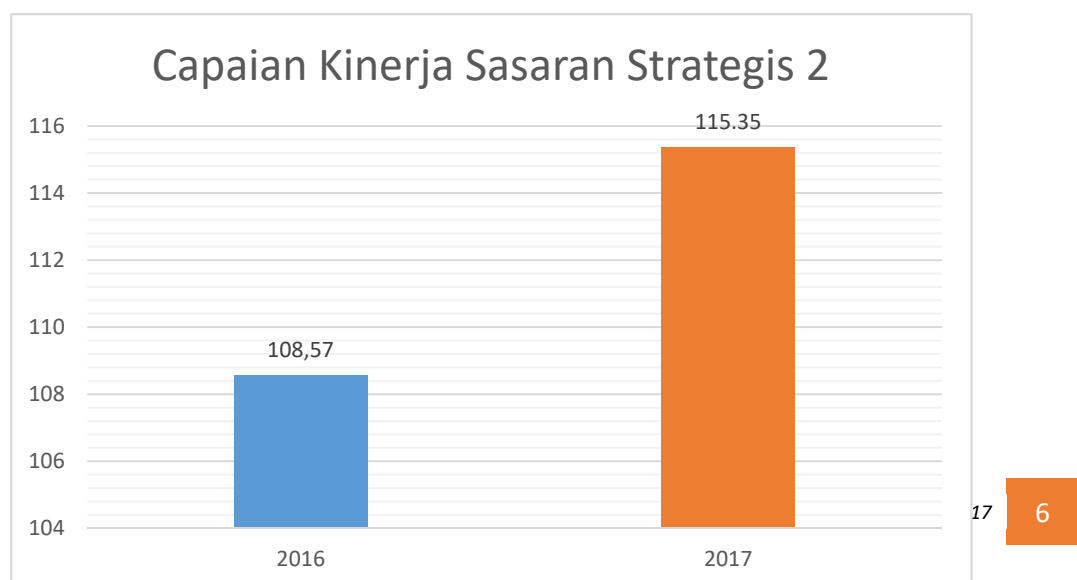
Tabel 6 Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian Kinerja 2016 (%)
1	Jumlah PNS yang terdata secara elektronik	9000	10382	115,35	108,57
Rata-rata				115,35	108,57

Untuk tahun 2017, rata-rata capaian sasaran strategis “Jumlah PNS yang terdata secara elektronik” adalah sebesar 115,35 % dengan kategori memuaskan. Peningkatan rata-rata capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2016 disajikan dalam grafik berikut ini :

Gambar 4

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2016-2017



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2016 telah tercapai sedangkan pada tahun 2017 mampu melampaui target yang dicapai pada tahun sebelumnya yang juga termasuk dalam kategori memuaskan. Indikator kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut hanya proses input data sistem informasi kepegawaian.

Realisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran tersebut di tahun 2017 adalah sebesar Rp.70.699.268,00 atau 81,85% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.86.380.511,00.

a. Jumlah PNS yang terdata secara elektronik

PNS yang terdata secara elektronik dimaksudkan untuk mempermudah kelancaran pelayanan, meminimalisis kontak langsung ke meja kerja guna menghindari gratifikasi, dan memudahkan pencarian informasi data terkait pegawai di Kalimantan Tengah, informasi manajemen kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah, maupun berita kepegawaian lainnya.

Realisasi IKU untuk tahun 2017 adalah sebesar 115,35% dengan predikat **memuaskan**. Capaian kinerja indikator tersebut dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan 6,78%. Hal ini dikarenakan target PNS yang terdata secara elektronik melebihi target yang sudah ditetapkan, kemudian telah terjadi penambahan jumlah pegawai pemerintah provinsi Kalimantan Tengah melalui pengalihan status kepegawaian jabatan fungsional Guru SMA/SMK menjadi Pegawai Provinsi.

Sasaran Strategis 3

“Meningkatkan Kapasitas SDM”

Sasaran strategis ketiga merupakan penjabaran peran BKD Provinsi Kalimantan Tengah mewujudkan tujuan terciptanya. Berkaitan dengan hal tersebut, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan yaitu bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

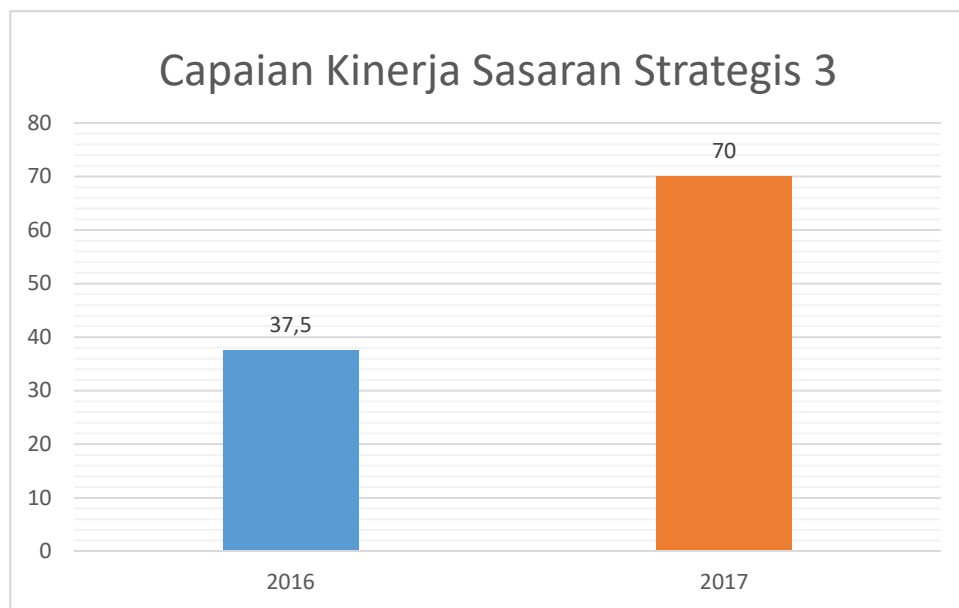
Sasaran strategis “Meningkatkan Kapasitas SDM” diindikasikan oleh IKU yang terkait dengan sumber daya manusia. Keberhasilan pencapaian dari masing-masing IKU pada sasaran strategis ketiga ini, tampak sebagaimana tabel di bawah ini yaitu :

Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian Kinerja 2016 (%)
2	Jumlah PNS yang meningkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan profesionalismenya	Orang	40	28	70	37,5
Rata-rata					70	37,5

Untuk tahun 2017, rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatkan kapasitas SDM” adalah sebesar 70% dengan kategori **baik**. Masih belum tercapainya target sasaran kinerja setiap tahunnya tersebut dikarenakan pada indikator jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian termasuk dalam kategori bintang sehingga perlu peninjauan kembali pada indikator kinerja utama untuk tahun kedepannya. Rata-rata capaian kinerja setiap tahunnya disajikan dalam grafik berikut ini:

Gambar 5
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2016-2017



Realisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran tersebut di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 96.701.084,00 atau 90,53 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 106.813.130,00.

a. Jumlah PNS yang meningkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan profesionalismenya

Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme PNS BKD Provinsi Kalimantan Tengah sehingga setiap PNS mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasinya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan formal maupun non formal, pendidikan dan pelatihan secara regular sesuai dengan kebutuhan.

Capaian kinerja indikator tersebut pada tahun 2016 adalah sebesar 37,5% dan masuk dalam predikat kurang. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, capaian kinerja tahun 2017 sama sebesar 37,5%.

Sasaran Strategis 4

“Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Karir Aparatur”

Sasaran strategis keempat ini ditetapkan untuk mencapai tujuan aparatur yang profesional dalam kerja baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor seperti yang tertuang dalam visi dan misi pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Sasaran strategis Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Karir Aparatur di tingkat BKD Provinsi Kalimantan Tengah diindikasikan oleh IKU yang terkait penanganan kasus pelanggaran disiplin, pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I dan II, dan seleksi penerimaan Capra IPDN.

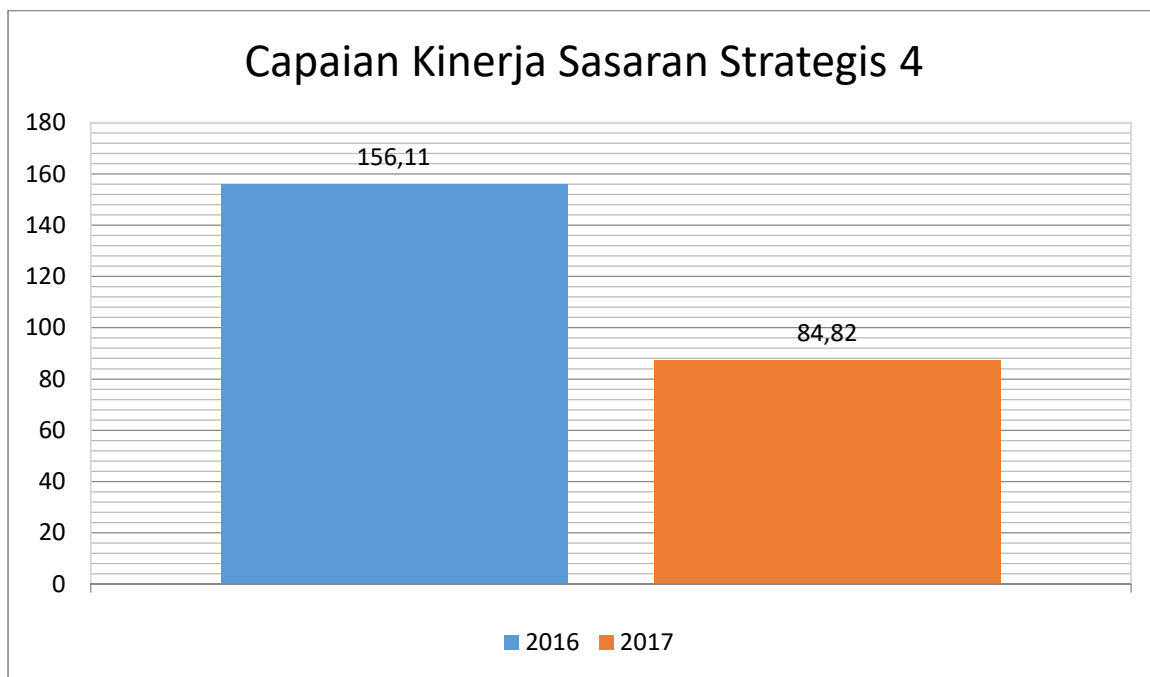
Secara keseluruhan, untuk tahun 2017 rata-rata capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 86,89%. Selengkapnya keberhasilan pencapaian masing-masing IKU pada sasaran strategis keempat ini, tampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian Kinerja 2016 (%)
1	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu	SK	10	9	90	760
2	Jumlah PNS Tugas Belajar yang dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian	Orang	4	4	100	35
3	Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian penyesuaian ijazah	Orang	400	292	73	79,5
4	Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian dinas	Orang	400	469	117,25	194,25
5	Jumlah capra IPDN sesuai alokasi formasi	Orang	155	48	30,96	24
Rata-rata					84,82	156,11

Untuk tahun 2017, rata-rata capaian sasaran strategis Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Karir Aparatur adalah sebesar 84,82 % dengan kategori **sangat baik**. Dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 rata-rata capaian kinerja disajikan dalam grafik berikut ini :

Gambar 6
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2016-2017



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 86,89% dan termasuk dalam kategori **sangat baik**, hal tersebut dikarenakan adanya indikator yang tidak mencapai target sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan capaian kinerjanya dan termasuk dalam kategori yang memuaskan.

Realisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran tersebut di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 684.595.909,00 atau 80,05% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 855.182.320,00.

a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu

Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah penanganan kasus dibagi jumlah target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pada tahun 2017 penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu sebanyak 5 SK penjatuhan disiplin, 2 Izin Perceraian dan 2 Izin ke Luar Negeri atau 90% dari target IKU. Pada tahun 2016, realisasi capaian kinerja mendapatkan hasil sebesar 760% dan terjadi penurunan sebanyak 670% dibandingkan dengan tahun 2016. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus pelanggaran disiplin dikalangan PNS semakin berkurang.

b. Jumlah PNS Tugas Belajar yang dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan bantuan biaya tugas belajar ikatan dinas bagi PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan.

Pada tahun 2017, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan bantuan tugas belajar kepada PNS yang ingin melanjutkan pendidikan sebanyak 4 orang dengan target kinerja indikator sebanyak 4 orang, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 100% dengan kategori memuaskan.

c. Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian penyesuaian ijazah.

Kegiatan yang dilakukan adalah ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Indikator kinerja utama ini diukur dengan total jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan ujian penyesuaian ijazah kepada PNS sebanyak 292 orang dengan target kinerja indikator sebanyak 400 orang, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 73% dengan kategori baik.

Capaian kinerja indikator tersebut dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,5%. Penurunan tersebut dikarenakan masih banyaknya PNS yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.

d. Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian dinas.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I dan II. Capaian kinerja indikator pada tahun 2016 adalah sebesar 777 orang dari target yang telah ditetapkan sebesar 400 orang dengan prosentase 194,25%. Indikator tersebut mendapatkan kategori memuaskan.

Pada kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Tingkat I dan II mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 77%, meskipun demikian kegiatan tersebut tetap melebihi target yang ditetapkan pada IKU.

e. Jumlah capra IPDN sesuai alokasi formasi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan seleksi jumlah pelamar Praja IPDN yang dilakukan untuk direkrut menjadi Praja IPDN. Adapun jumlah peserta yang lulus belum memenuhi target yang diharapkan, karena adanya batas kuota untuk provinsi Kalimantan Tengah. Pada kegiatan Seleksi Penerimaan Capra IPDN diketahui bahwa peserta Capra IPDN yang melaksanakan tes seleksi berjumlah 512 orang, kemudian setelah melalui tahapan-tahapan seleksi yang menggunakan sistem gugur (tes Kompetensi Dasar, tes Psikologi, Tes Kesehatan, dan tes Kesemampuan/Fisik) sehingga pada akhirnya Peserta Capra IPDN yang lulus tes berjumlah 48 orang. Terlihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 6,96% dibandingkan pada tahun 2016. Berkurangnya kuota daerah untuk formasi lulusan IPDN dikarenakan oleh kebijakan penerimaan yang dilakukan sepenuhnya oleh panitia pusat.

“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur”

Sasaran strategis kelima ini ditetapkan untuk pemberian pelayanan kepegawaian di BKD Provinsi Kalimantan Tengah, baik dalam hal birokrasi internal kepegawaian maupun pelayanan eksternal kepada PNS Provinsi Kalimantan Tengah maupun kepada publik pada umumnya.

Sasaran strategis “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur” diindikasikan oleh IKU yang terkait langsung dengan penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis 5 tahun 2017 adalah sebesar 180%. Selengkapnya keberhasilan pencapaian IKU pada sasaran strategis kelima ini, tampak sebagaimana tabel berikut :

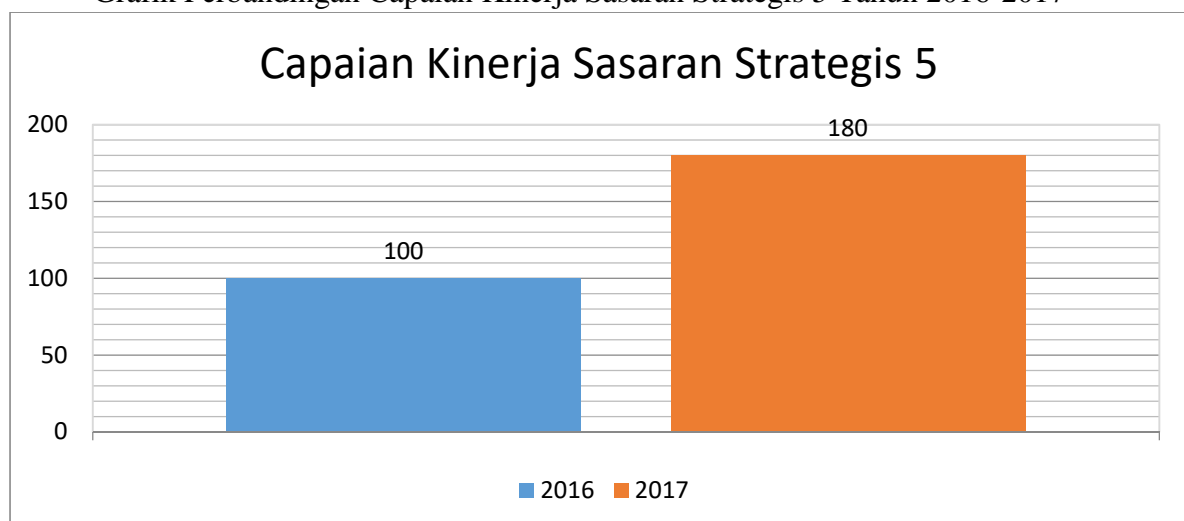
Tabel 9 Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Capaian Kinerja 2016 (%)
2	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jenis	5	9	180	100
Rata-rata					180	100

Untuk tahun 2017, rata-rata capaian sasaran strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 180% dengan kategori memuaskan. Peningkatan dan penurunan rata-rata capaian kinerja tahun 2017 disajikan dalam grafik berikut ini :

Gambar 7

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2016-2017



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan IKU. Hal tersebut dikarenakan jumlah pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor pada anggaran perubahan APBD mengalami penambahan dari 5 (lima) jenis menjadi 9 (sembilan) jenis.

Realisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran tersebut di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 403.500.000,00 atau 99,26% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 406.521.500,00.

a. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan BKD Provinsi Kalimantan Tengah guna memperlancar suatu proses pekerjaan sehingga pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Capaian kinerja indikator pada tahun 2017 adalah sebesar 9 jenis atau 180% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 5 jenis. Untuk capaian kinerja indikator ini mendapatkan kategori memuaskan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi DPA 2017

Realisasi belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rp.16.635.929.121,00 atau 87,53% dari anggaran yaitu sebesar Rp.19.006.796.866,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi belanja per jenis program, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Non program	8.926.861.366	7.103.730.435	79,58
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.055.409.040	1.933.936.746	94,00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	426.320.000	387.737.500	90,95
4	Program peningkatan disiplin aparatur	52.797.500	45.100.000	85,42
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	106.813.130	96.701.084	90,53
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	277.186.250	267.806.250	96,62
7	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	627.426.500	603.456.602	96,18
8	Program Pendidikan Kedinasan	753.831.675	745.970.445	98,96
9	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	4.333.560.380	4.110.879.309	94,86
10	Program Penguatan Kelembagaan KORPRI	1.401.591.025	1.303.267.800	92,98
11	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/	69.320.000	37.342.950	82,98

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Barang Daerah			
	Jumlah	19.006.796.866	16.635.929.120,74	87,53

b. Realisasi belanja perjenis belanja yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Langsung	10.079.935.500,00	9.532.198.685,74	94,57
2	Belanja Tidak Langsung	8.926.861.366,00	7.103.730.435,00	79,58
	Jumlah	19.006.796.866,00	16.635.929.120,74	87,53

Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan BKD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi Keuangan		
				Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	30.000.000	80,00%	28.755.158,00	95,85%
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	317.500.000	80,00%	248.125.786,00	78,15%
3		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	10.000.000	80,00%	5.368.682,74	53,69%
4		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000	80,00%	1.795.600,00	29,93%
5		Penyediaan jasa administrasi keuangan	377.471.050	80,00%	354.971.050,00	94,04%
6		Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.500.000	80,00%	30.270.000,00	80,72%
7		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.000.000	80,00%	22.000.000,00	100,00%
8		Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0,00%	0,00	0,00%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi Keuangan		
				Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
9		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	80,00%	38.550.000,00	96,38%
10		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.000.000	80,00%	50.000.000,00	100,00%
11		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	406.521.500	80,00%	403.500.000,00	99,26%
12		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36.320.000	80,00%	34.373.000,00	94,64%
13		Penyediaan makanan dan minuman	7.525.000	80,00%	6.825.000,00	90,70%
14		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	224.368.950	80,00%	224.366.630,00	100,00%
15		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	149.935.500	80,00%	149.908.600,00	99,98%
16		Pembinaan non PNS	340.267.040	80,00%	335.127.239,00	98,49%
17		Rujukan Berobat PNS	0	80,00%	0,00	0,00%
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	27.320.000	80,00%	27.100.000,00	99,19%
19		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000	80,00%	79.800.000,00	99,75%
20		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	184.000.000	80,00%	157.187.500,00	85,43%
21		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	35.000.000	80,00%	30.000.000,00	85,71%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi Keuangan		
				Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		kantor				
22		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100.000.000	80,00%	93.650.000,00	93,65%
23	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	52.797.500	80,00%	45.100.000,00	85,42%
24	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	106.813.130	80,00%	96.701.084,00	90,53%
25	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	220.000.000	80,00%	218.000.000,00	99,09%
26		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	27.186.250	80,00%	19.806.250,00	72,85%
27		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	30.000.000	80,00%	30.000.000,00	100,00%
28	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	130.000.000	80,00%	129.754.284,00	99,81%
29		Proses input data sistem informasi kepegawaian	86.380.511	80,00%	70.699.268,00	81,85%
30		Pengembangan aplikasi pada sistem informasi manajemen kepegawaian Prov. Kalteng	20.000.000	80,00%	20.000.000,00	100,00%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi Keuangan		
				Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
31		Penataan Dokumen PNS	70.975.989	80,00%	63.945.850,00	90,10%
32		PPID BKD	10.120.000	80,00%	10.120.000,00	100,00%
33		Pengembangan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) Pemprov Kalteng	131.400.000	80,00%	131.354.700,00	99,97%
34		Sistem Informasi Manajemen (SIM) Absensi Terpusat	178.550.000	80,00%	177.582.500,00	99,46%
35	Program Pendidikan Kedinasan	Rakor Kepegawaian	489.081.675	80,00%	486.343.645,00	99,44%
36		Seleksi Penetapan dan Monitoring Tugas Belajar dan Izin Belajar	264.750.000	80,00%	259.626.800,00	98,06%
37	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	200.000.000	80,00%	199.999.070,00	100,00%
38		Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	74.469.100	80,00%	67.262.300,00	90,32%
39		Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	265.538.160	80,00%	253.297.124,00	95,39%
40		Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	244.003.500	80,00%	163.403.500,00	66,97%
41		Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	100.000.000	80,00%	95.822.500,00	95,82%
42		Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan II	86.475.000	80,00%	79.772.600,00	92,25%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi Keuangan		
				Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
43		Peningkatan Pelayanan Pensiun	100.000.000	80,00%	98.502.900,00	98,50%
44		Seleksi Penerimaan Capra IPDN	145.640.660	80,00%	92.300.185,00	63,38%
45		Penyusunan Pemberian Kesejahteraan Aparatur	100.000.000	80,00%	97.335.925,00	97,34%
46		Penyusunan rencana karir PNS	2.657.371.050	80,00%	2.610.606.214,00	98,24%
47		Penataan Jabatan Fungsional	125.000.000	80,00%	120.438.100,00	96,35%
48		Mutasi PNS	91.980.000	80,00%	91.685.260,00	99,68%
49		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan kepegawaian	68.082.910	80,00%	67.076.031,00	98,52%
50		Pelepasan pensiun/purna tugas PNS BUP	75.000.000	80,00%	73.377.600,00	97,84%
51	Program Penguatan Kelembagaan KORPRI	Publikasi Hari Korps Pegawai Republik Indonesia	165.000.000	100,00%	157.343.500,00	95,36%
52		Pembinaan mental dan kerohanian PNS	300.000.000	80,00%	296.795.000,00	98,93%
53		Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Jasmani PNS	191.659.091	80,00%	188.500.000,00	98,35%
54		Rapat kerja DPP/DPK se Kalteng	100.000.000	80,00%	89.800.100,00	89,80%
55		Pengayoman dan bantuan hukum bagi PNS bermasalah	50.000.000	80,00%	46.512.100,00	93,02%
56		Pekan Olahraga Nasional (PORNAS)	594.931.934	80,00%	524.317.100,00	88,13%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi Keuangan		
				Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		KORPRI				
57	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Pengelolaan inventaris barang daerah	45.000.000	75,00%	37.342.950	82,98%
JUMLAH			10.079.935.500		9.532.198.685,74	94,57%

Belanja tidak langsung merupakan yang terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji pokok PNS/Uang representasi	3.970.274.140,00	3.467.080.392,00	87,33%
2	Tunjangan keluarga	356.510.700,00	239.128.668,00	67,07%
3	Tunjangan jabatan	290.500.000,00	207.050.000,00	71,27%
4	Tunjangan fungsional	119.350.000,00	56.485.000,00	47,33%
5	Tunjangan fungsional umum	180.040.000,00	114.960.000,00	63,85%
6	Tunjangan beras	229.329.000,00	161.134.500,00	70,26%
7	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	378.004.872,00	109.025.678,00	28,84%
8	Pembulatan gaji	78.806,00	50.141,00	63,63%
9	Iuran asuransi kesehatan	133.537.848,00	95.664.338,00	71,64%
10	Iuran jaminan sosial tenaga kerja (JKK)	10.961.000,00	7.123.005,00	64,98%
11	Iuran jaminan sosial tenaga kerja (JKM)	21.825.000,00	8.903.713,00	40,80%
12	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	2.710.050.000,00	2.246.500.000,00	82,90%
13	Tambahan penghasilan uang makan	521.400.000,00	390.625.000,00	74,92%
14	Insentif pemungutan retribusi daerah	5.000.000,00	0,00	0,00%
Jumlah		8.926.861.366,00	7.103.730.435,00	79,58%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 merupakan Laporan Kinerja periode Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sehingga di dalam laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 dengan membandingkan kinerjanya dengan tahun 2016.

Laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diukur dengan merata-ratakan seluruh sasaran strategis yang diwakili oleh masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran keberhasilan sasaran strategis lebih dititikberatkan pada indikator *outcome*.

Adapun capaian sasaran strategis dan upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

Berdasarkan Renstra 2016-2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 5 sasaran strategis dengan 13 indikator keberhasilan, capaian kinerja rata-rata 5 sasaran strategis tersebut adalah sebesar 106,59% termasuk dalam kategori **memuaskan** dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian	98,97
2	Meningkatkan sistem informasi kepegawaian berbasis IT	115,35
3	Meningkatkan SDM	70
4	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur	84,82
5	Meningkatkan sarana dan prasarana	180
Rata-rata capaian Sasaran Strategis		106,59

Dari 5 sasaran strategis tersebut, sasaran capaian kinerjanya telah optimal dengan rata di atas nilai 100% dengan kategori memuaskan.

B. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja

Capaian sasaran strategis di atas belum merupakan capaian optimal dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan upaya-upaya kegiatan diantaranya dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan Profesionalisme Perilaku Kerja Aparatur Pemerintah

Perilaku aparat pemerintah merupakan gambaran tentang apa saja yang menjadi tindakan aparat. Seorang aparat pada pelaksanaan kerjanya, perilaku kerja ini dapat menggambarkan kinerja yang dimiliki oleh seorang aparat pada bidang atau pada bagian yang ditempatinya. Perilaku kerja aparat dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam segala bidang terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur dan dinilai berdasarkan hasil kerja yang dicapai, oleh karena itu semuanya tergantung pada moral yang dimiliki oleh masing-masing aparat baik atasan maupun bawahan apakah mereka mampu menjaga kemampuan kerja mereka dengan baik atau tidak.

2. Mewujudkan Fasilitas Kerja yang Memadai

Fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai hasil yang efektif. Apabila fasilitas kerja pegawai dalam melaksanakan tugas telah terpenuhi maka pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitupun sebaliknya, bila fasilitas kerja kurang memadai dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.

Kemampuan Sumber Daya Aparatur juga dituntut untuk mampu menggunakan fasilitas kerja sebagai penunjang keberhasilan tugas dan pekerjaan dalam bidang pemerintahan. Keahlian aparat menggunakan fasilitas yang tersedia walaupun belum memadai merupakan satu kemampuan dan satu keuntungan yang tersedia bagi pegawai/aparat.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan penunjang keberhasilan tugas secara efisien yaitu kemampuan atau keahlian dan tersedianya fasilitas secara memadai.

3. Peningkatan Disiplin Kerja

Disiplin kerja merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Disiplin kerja menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, maka disiplin kerja pegawai perlu ditegakkan dalam kinerja pegawai seperti datang ke kantor tepat waktu, meninggalkan kantor setelah jam kerja selesai, penyelesaian tugas-tugas yang diberikan tepat waktu dan lain sebagainya. Apabila dilaksanakan dengan baik dan benar serta konsekuen pastilah pelaksanaan tugas/pelaksanaan dapat berjalan efektif, tertib dan lancar.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta memberi masukan bagi peningkatan dan penguatan peran BKD untuk memenuhi harapan banyak pihak, yaitu terwujudnya *good governance*.